

PENYELENGGARAAN PROGRAM SD-SMP SATU ATAP DALAM LATAR BUDAYA RUMAH BETANG KALIMANTAN TENGAH

Rudi Hasan

Universitas Palangka Raya, Kampus Tunjung Nyaho Jl. Yos Sudarso Palangka Raya
e-mail: rudi.hasan87@yahoo.com

Abstract: The Implementation of Integrated (under-one-roof) Primary-Junior Secondary Schooling within the Cultural Context of *Rumah Betang*-Central Kalimantan. This study describes the implementation of integrated primary-junior secondary schooling within the cultural context of *Rumah Betang*—Central Kalimantan in relation to bureaucratic structure, resources, and communication. This qualitative study was carried out in three sites. The results show that clear standards, intensive coordination, and the empowerment of human resources in view of the cultural values of *Rumah Betang* could lead to effective implementation of integrated (under-one-roof) primary-junior secondary schooling.

Keywords: *sekolah satu atap* (integrated or under-one-roof schooling), bureaucratic structure, resources, communication, *Rumah Betang*

Abstrak: Penyelenggaraan Program SD-SMP Satu Atap dalam Latar Budaya Rumah Betang Kalimantan Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyelenggaraan program SD-SMP Satu Atap dalam latar budaya rumah Betang Kalimantan Tengah yang dikaitkan dengan struktur birokrasi, sumber daya, dan komunikasi. Penelitian kualitatif dilaksanakan di tiga lokasi, yaitu pada SMPN Satu Atap 1 Mihing Raya, SMPN Satu Atap 2 Kurun, dan SMPN Satu Atap 3 Tewah di Kabupaten Gunung Mas, Propinsi Kalimantan Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa acuan standar yang jelas, koordinasi yang intensif, dan pemberdayaan sumber daya manusia yang tepat sesuai dengan pendekatan nilai-nilai budaya rumah Betang dapat mencapai penyelenggaraan program SD-SMP Satu Atap yang efektif. Hal itu juga didukung oleh pengelolaan sumberdaya dan komunikasi yang mendasarkan diri pada nilai kekeluargaan, kebersamaan, loyalitas, dan keakraban.

Kata kunci: sekolah satu atap, struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi, rumah betang

Secara tegas, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 telah mengatur pendidikan bagi warga negara Indonesia. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Pemerintah wajib membiayainya. Secara rinci dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 6 dinyatakan, bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Itu diatur secara operasional dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Salah satu alternatif pendidikan dasar sembilan tahun yang diselenggarakan untuk daerah terpencil dan jauh dari akses SMP pada umumnya adalah program SD-SMP Satu Atap.

Pada daerah terpencil dan terpencar, bahkan untuk daerah terisolasi, umumnya SMP belum didirikan sebagaimana mestinya atau SMP yang sudah ada berada di luar jangkauan lulusan SD setempat. Karena jumlah lulusan SD di daerah tersebut pada umumnya relatif sedikit, pembangunan unit sekolah baru SMP dipandang tidak efisien berdasarkan sumber dana atau sumber daya lainnya. Daerah tersebut biasanya merupakan daerah-daerah yang Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk SMP masih rendah dan merupakan lokasi tempat anak-anak yang belum memperoleh layanan pendidikan SMP atau yang sederajat. Padahal secara filosofi setiap manusia berhak mendapatkan akses peningkatan kualitas hidup, harkat dan martabat di manapun berada tanpa memandang ras, suku atau etnik, agama, dan budaya apapun.

Salah satu aspek budaya berkaitan dengan penyelenggaraan program sekolah satu atap di Provinsi Kalimantan Tengah adalah budaya rumah Betang. Adapun rumah Betang adalah bentuk rumah panggung yang memanjang dengan tiang yang tinggi yang dihuni oleh beberapa keluarga yang terikat dengan nilai-nilai dan hukum adat Dayak. Rumah betang ini setara dengan nilai kerukunan yang diusung suku Dayak, khususnya di Kabupaten Gunung Mas yang sebagian besar dihuni suku Dayak Ngaju (Kahayan). Rumah Betang kemudian dipandang sebagai sebuah komponen penting dalam menjaga kerukunan dan hubungan-hubungan yang lebih akrab. Rumah terdapat di berbagai penjuru Kalimantan Tengah, terutama di daerah hulu sungai yang biasanya menjadi pusat pemukiman suku Dayak (Kusni, 2009).

Nilai utama yang menonjol dalam kehidupan di rumah Betang adalah nilai kebersamaan di antara para warga yang menghuninya, terlepas dari perbedaan-perbedaan yang mereka miliki. Suku Dayak adalah suku yang menghargai suatu perbedaan, baik perbedaan etnik, agama ataupun latar belakang sosial lainnya. Budaya rumah betang adalah budaya yang menjunjung nilai kebersamaan, keakraban, kekeluargaan, persamaan hak, saling menghormati, loyalitas dan tenggang rasa (Dayurara, 2010).

Penyelenggaraan program sekolah satu atap sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan kebijakan pemerataan pendidikan dasar sembilan tahun (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 1990), tidak lepas dari beberapa variabel pendukung program pada suatu lembaga atau sekolah. Berdasarkan beberapa hasil penelitian, variabel-variabel pendukung implementasi kebijakan suatu program, antara lain adalah regulasi, sikap pelaksana, *stakeholders*, kepemimpinan, komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, ekonomi, politik, sosial, strategi manajemen, legitimasi, *monitoring* dan evaluasi (Edward, 1980; Dunn, 1981; Winarno, 2002; Brienkerhoof & Crosby, 2002).

Dalam penelitian ini dibahas variabel pendukung sebagai dimensi yang saling terkait pada penyelenggaraan program sekolah satu atap dengan dasar nilai-nilai budaya rumah betang. Adapun dimensi yang berhubungan dengan penyelenggaraan program sekolah satu atap dalam penelitian ini akan dijabarkan dalam tiga dimensi penyangga dalam penyelenggaraan program, yaitu struktur birokrasi, ketersediaan sumber daya pendidikan, dan komunikasi; sehingga perlu dideskripsikan, bagaimana kaitan tiga hal tersebut dalam mendukung penyelenggaraan program SD-SMP Satu Atap.

METODE

Penelitian ini dilakukan mulai akhir tahun 2010 sampai awal 2012 dengan kehadiran peneliti di lokasi yang dilakukan secara berkesinambungan dapat dibedakan menjadi tiga tahap, yaitu tahap pertama, melakukan penelitian awal (studi pendahuluan) untuk menentukan fokus penelitian; tahap kedua, melakukan pengumpulan data demi memertajam fokus penelitian; tahap ketiga, pengumpulan data penelitian secara rinci dan mendalam sesuai fokus penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebab berhubungan dengan hal yang pelik, analisis mendalam, antropologis-etnografis, memiliki arti yang luas, konkret, dan selangsiung mungkin (Miles & Huberman, 1984). Pertimbangan untuk mendekati penelitian ini secara kualitatif sangat beralasan, karena masalah penyelenggaraan program SD-SMP satu atap sebagai alternatif pemerataan pendidikan dasar sembilan tahun di daerah terpencil mempunyai persoalan yang sangat pelik dan kompleks. Penelitian ini difokuskan pada penyelenggaraan program SD-SMP satu atap sebagai alternatif pemerataan pendidikan dasar sembilan tahun pada daerah terpencil dalam latar budaya rumah betang Kalimantan Tengah. Ini berarti yang diteliti adalah proses dari sebuah penyelenggaraan program. Pada penelitian ini digunakan rancangan penelitian studi multi situs dengan *modified analysis induction*. Dipilihnya studi multi situs karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk memperoleh gambaran tentang penyelenggaraan program sekolah satu atap secara rinci dan menyeluruh dari tiga subjek penelitian pada latar alami dengan karakteristik yang sama.

Penelitian ini dilaksanakan di tiga lokasi, yaitu pada SMPN Satu Atap 1 Mihing Raya, SMPN Satu Atap 2 Kurun, dan SMPN Satu Atap 3 Tewah di Kabupaten Gunung Mas, Propinsi Kalimantan Tengah. Pemilihan ketiga SMPN Satu Atap sebagai lokasi penelitian dimaksudkan merepresentatif SMP Satu Atap di Kabupaten Gunung Mas. Sebab SMPN Satu Atap 1 Mihing Raya terletak agak hilir sungai Kahayan, SMPN Satu Atap 2 Kurun sekitar pertengahan sungai Kahayan, dan SMPN Satu Atap 3 Tewah agak hulu sungai Kahayan di wilayah Kabupaten Gunung Mas.

Pada penelitian ini, peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian (Mantja, 2008; Ary dkk., 2002). Peneliti dianggap sebagai instrumen kunci yang dia sendiri mengumpulkan data dengan cara memeriksa dokumen, mengamati perilaku, mewawancarai partisipan, dan peneliti terlibat dalam pengalaman hubungan jangka panjang secara intensif dengan partisipan. Dengan demikian, peneliti tinggal dalam waktu yang cukup lama di lokasi penelitian, melakukan observasi

secara tekun, menggunakan berbagai metode pengumpulan data, menggunakan triangulasi sumber data dan berbagai metode, membuat *audit trail*, menggunakan *member checks* untuk memeriksa keabsahan data (Ary, 2002).

Prosedur yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi partisipan (*participant observation*) dan studi dokumentasi (*study of documents*) (Sonhadji, 1996; Bogdan & Biklen, 1998; Nasution, 1998; Mantja, 2008).

Analisis dilakukan melalui kegiatan mengorganisasi data, menata dan membagi data dalam unit-unit yang dapat dikelola, mensintesis, mencari pola, menemukan apa yang bermakna dan apa yang diteliti untuk diputuskan dan dilaporkan dengan sistematis (Bogdan dan Biklen, 1998). Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu analisis data tiap situs (situs tunggal) dan analisis data lintas situs.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Birokrasi dalam Penyelenggaraan Program SD-SMP Satu Atap

Aspek standar operasional prosedur atau acuan pelaksanaan secara umum pada penyelenggaraan program SD-SMP Satu Atap sudah mengacu pada standar operasional kerja. Hal ini terlihat pada kepala sekolah dalam penyelenggaraan program sekolah melibatkan seluruh komponen sekolah, pembagian tugas dilakukan secara cermat dengan uraian tugas yang jelas, kepala sekolah memberi kepercayaan penuh kepada guru dalam penyelenggaraan program sekolah, pendekatan kekeluargaan yang akrab dilakukan untuk meningkatkan kesadaran guru dalam penyelenggaraan program sekolah. Hal ini dilakukan dalam implementasi nilai-nilai yang tersirat dalam budaya rumah betang.

Koordinasi dalam struktur birokrasi secara umum telah dilakukan dengan baik dan koordinatif. Koordinasi dilakukan setiap waktu, karena ruangan guru dan kepala sekolah jadi satu. Koordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan di Kabupaten dilakukan secara rutin dan intensif. Koordinasi dengan pengurus komite sekolah dilakukan secara proaktif. Pengelolaan SD dan SMP terpisah, tetapi koordinasi sering dilakukan secara kekeluargaan yang akrab dan kebersamaan seperti yang dianut dalam budaya rumah betang.

Aspek efisiensi pemberdayaan sumber daya manusia terungkap dalam temuan penelitian bahwa pemberdayaan sumber daya manusia didasarkan pada

kemampuan dan kemauan (komitmen) dengan rasa tanggung jawab. Mereka tidak membedakan guru yang berstatus PNS maupun guru honor dalam memberikan tugas-tugas sekolah. Mereka mengutamakan guru yang mempunyai kemampuan dan kemauan (komitmen) tanpa mengabaikan yang lain. Pada penyelenggaraan program sekolah, kepala sekolah membagi tugas kepada guru sebagai wakasek, bendahara sekolah, wali kelas, pembina ekstrakurikuler. Solusi untuk mengatasi kekurangan guru mata pelajaran, beberapa guru ditugaskan mengajar dua mata pelajaran.

Sumber Daya Pendidikan

Kepala sekolah masih baru dan pertama kali menjabat sebagai kepala SMP, sehingga masih dalam dalam "proses belajar" sebagai pimpinan di SMP. Secara kuantitas, jumlah guru masih kurang terutama guru tetap (PNS). Secara kualitas, beberapa guru mengajar tidak sesuai latar belakang pendidikannya. Untuk meningkatkan profesionalitas, guru dilibatkan dalam aktivitas Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Solusi kekurangan guru dilakukan dengan memberdayakan guru honorer (GTT). Sekolah Satu Atap belum memiliki pegawai kependidikan untuk memperlancar penyelenggaraan program sekolah, seperti TU, laboran, pustakawan, *cleaning service* dan penjaga sekolah. Administrasi sekolah dikerjakan bersama oleh kepala sekolah, wakasek, dan guru di luar jam sekolah. Keterbatasan tenaga memacu kepala sekolah dan guru untuk lebih kreatif dan inovatif dalam penyelenggaraan program sekolah.

Bangunan utama untuk ruang kegiatan belajar siswa sudah ada dengan kondisi ruang sudah cukup representatif. Ruang guru dan ruang kepala sekolah masih jadi satu, dan belum representatif untuk ruang kerja baik guru maupun kepala sekolah. *Toilet* sebagai sanitasi sekolah sudah ada untuk siswa maupun guru meskipun masih minim. Prasarana belajar seperti, energi listrik, laboratorium dan perpustakaan masih belum ada. Buku sumber untuk menunjang proses belajar siswa masih kurang. *Laptop* atau komputer jumlahnya masih sangat terbatas, baik untuk kepentingan administrasi sekolah maupun menunjang pelajaran TI. Lapangan olah raga dan upacara jadi satu dengan SD penyangga.

Semua sekolah telah melaksanakan program subsidi sekolah gratis berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas nomor 14 tahun 2009. Sumber utama pendanaan sekolah berasal dari pemerintah. Dana BOS biasanya dikirim dalam bentuk pakaian siswa. Dana Alokasi Khusus (DAK) diberikan dalam bentuk peralatan sekolah seperti alat-alat olah raga dan mabelair.

Pembayaran honor guru GTT dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) Propinsi Kalimantan Tengah.

Komunikasi dalam Penyelenggaraan Program SD-SMP Satu Atap

Komunikasi dilakukan setiap saat sesuai dengan keperluan dan berlangsung secara formal maupun non-formal. Komunikasi secara nonformal dalam pergaulan sehari-hari dilakukan dengan bahasa daerah Dayak Ngaju. Kelancaran komunikasi secara lisan didukung oleh tempat atau ruangan yang jadi satu antara ruang kepala sekolah dengan guru-guru. Pesan disampaikan secara cermat dan langsung tanpa penundaan. Komunikasi sekolah dengan siswa berlangsung secara rutin di luar pembelajaran kelas, dilakukan setiap pagi hari di halaman sekolah untuk informasi atau pembinaan dan berdoa bersama. Komunikasi dengan seluruh personal berjalan lancar dan akrab, serta berlangsung dengan penuh suasana kekeluargaan yang mencerminkan budaya rumah Betang.

Aspek komunikasi SMP Satu Atap dengan SD penyangga terungkap dalam temuan penelitian lintas situs berikut. Pendataan siswa SD untuk alih jenjang SD ke SMP secara rutin setiap tahun. Alih jenjang dari SD ke SMP tidak dilakukan tes seleksi. Pada hari Jum'at sering diadakan kegiatan bersama seperti olah raga. Upacara bendera dilakukan bersama tiap hari Senin jika tidak hujan. Meskipun secara pengelolaan sekolah terpisah, tetapi nuansa satu atap masih sangat dirasakan dengan komunikasi yang lancar dan beberapa kegiatan dilakukan bersama SD penyangga sebagai wujud terhadap implementasi nilai-nilai budaya rumah Betang.

Aspek komunikasi SMP Satu Atap dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan dilakukan secara intensif dan proaktif oleh pihak sekolah. Komunikasi tersebut berbentuk usulan atau pelaporan secara rutin, urusan biaya rutin sekolah dan sebagainya. Secara struktural SMP Satu Atap langsung di bawah Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten. Komunikasi dengan pihak UPTD Pendidikan di kecamatan hanya bersifat koordinatif.

Aspek komunikasi SMP Satu Atap dengan masyarakat sekitar terjadi secara positif, baik langsung maupun tidak langsung. Masyarakat menyambut baik keberadaan SMP Satu Atap. Komunikasi nonformal dilakukan dalam bentuk kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan sebagai wujud implementasi nilai budaya rumah Betang.

Pembahasan struktur birokrasi dalam penyelenggaraan program SMP Satu Atap tidak lepas dari pem-

bahasan konsep birokrasi itu sendiri. Konsep birokrasi pertama kali dikenalkan oleh Weber yang mengemukakan bahwa, secara umum organisasi birokrasi memiliki struktur hirarkis yang baku, formal dan berjangka waktu panjang dengan prosedur-prosedur (Dwijowijoto, 2004). Robbins (1998) mengemukakan, bahwa birokrasi dicirikan oleh tugas-tugas operasional secara rutin yang dicapai lewat spesialisasi dan aturan serta pengaturan secara formal. Kekuatan struktur birokrasi terletak dalam kemampuan menjalankan program secara efisien.

Penyelenggaraan program SD-SMP Satu Atap di lokasi penelitian telah mengaplikasikan teori struktur birokrasi tersebut. Aplikasinya disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah. Di sisi lain, faktor kepemimpinan kepala sekolah dalam penyelenggaraan program sekolah juga menentukan, yaitu rata-rata menerapkan pendekatan situasional yang demokratis. Hasilnya terciptanya iklim sekolah yang kondusif dan terjadi efektifitas dan efisiensi sekolah yang didasari oleh nilai-nilai budaya, khususnya budaya rumah betang Kalimantan Tengah.

Dengan segala keterbatasan, dimensi struktur birokrasi telah diselenggarakan dan berjalan secara efektif dan maksimal. Standar operasional kerja dilakukan secara cermat sesuai aturan-aturan yang ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan. Koordinasi dengan semua komponen dilakukan secara aktif yang dilandasi oleh iklim kekeluargaan yang akrab. Efisiensi pemberdayaan sumber daya manusia dilakukan sesuai dengan kondisi sekolah yang serba terbatas untuk mencapai sekolah yang efektif (Bollen, 1997).

Kepala sekolah pada umumnya menggunakan pendekatan lapangan (*field approach*) untuk mendukung penyelenggaraan program SMP Satu Atap yang ada di tiga situs penelitian. Pendekatan lapangan yang dilakukan kepala sekolah, yaitu dengan pengorganisasian sekolah sesuai kondisi lingkungan sekolah yang ada (apa adanya), yang penting bagaimana sekolah bisa terselenggara dengan baik dan lancar. Sehingga dalam hal ini, salah satu budaya daerah yang berupa nilai-nilai budaya rumah Betang yang meliputi nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan loyalitas terhadap pimpinan dan sekolah akan memberikan andil yang besar dalam penyelenggaraan sekolah. Dengan demikian, kearifan budaya lokal yang positif dapat dimanfaatkan dalam memperlancar dan menyelenggarakan program sekolah secara efektif, sehingga kepemimpinan situasional yang kreatif dengan daya abstrak dan komitmen yang tinggi sangat tepat.

Ketersediaan sumber daya pendidikan merupakan dimensi yang tidak kalah pentingnya dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan program pendidikan. Walaupun program telah ditransmisikan secara

akurat, jelas, dan konsisten, tetapi jika sumber daya tidak tersedia secara memadai untuk melaksanakan program, maka kemungkinan pelaksanaan program tidak akan efektif. Edward (1980) mengemukakan bahwa sumber daya merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan program.

Dukungan sumber daya merupakan hal penting untuk menjaga kelangsungan organisasi (Castetter, 1996). Dukungan sumber daya dimaksud meliputi aspek sumber daya manusia, sumber daya fisik (prasarana dan sarana), dan sumber daya pendanaan atau pembiayaan. Perpaduan sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan program harus disediakan secara serentak. Perpaduan sumber daya dimaksud meliputi sumber daya manusia, sumber daya fisik (prasarana dan sarana), dan sumber daya pendanaan atau pembiayaan. Sehingga dalam penyelenggaraan program sekolah ketiga aspek dalam dimensi sumber daya harus dilakukan secara sinergi untuk mencapai tujuan sekolah yang efektif.

Seluruh aspek sumber daya dapat mendukung penyelenggaraan program SMP Satu Atap. Hal tersebut tidak lepas dari nilai-nilai budaya rumah Betang sebagai latar dalam penyelenggaraan sekolah. Dengan nilai kebersamaan dan kekeluargaan, segala keterbatasan sumber daya dapat diatasi, misalnya penggunaan prasarana bersama antara SD dan SMP, hubungan yang harmonis antara sekolah dengan semua pihak. Dengan demikian keberadaan sumber daya tidak hanya menjadi tanggungjawab kepala sekolah saja, tetapi semua pihak.

Komunikasi secara empirik berlangsung efektif dan lancar. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan implikasi iklim sekolah yang membawa nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, loyalitas, dan keakraban yang terkandung dalam budaya rumah Betang sebagai acuan norma sosial di masyarakat. Komunikasi mempunyai peranan yang penting dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan program sekolah (Usop, 1994).

Dimensi komunikasi merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam pengembangan sekolah untuk menjadi sekolah yang efektif. Dalam melaksanakan tugas-tugas, banyak aturan yang harus dibuat. Komunikasi digunakan untuk menyebarkan informasi dan prosedur-prosedur yang merupakan bagian dari budaya sekolah profesional secara bersama-sama dalam

pertemuan-pertemuan staf, sehingga tercipta hubungan-hubungan profesional yang baik antara personil sekolah.

Robbins (1998) dinyatakan bahwa komunikasi mempunyai empat fungsi utama dalam suatu lembaga atau organisasi, yaitu sebagai kendali (kontrol, pengawasan), motivasi, pengungkapan emosional, dan informasi. Dari keempat fungsi tersebut, dimensi komunikasi dalam penyelenggaraan program SD-SMP Satu Atap telah difungsikan terhadap sasaran secara baik dengan kondisi komunikatif positif. Meskipun dengan kondisi yang terbatas, penyelenggaraan program SD-SMP Satu Atap berjalan lancar tanpa ada hambatan yang berarti. Hal ini sesuai dengan pendapat Koehler (1981). Ia menyatakan bahwa beberapa studi terakhir mengungkap komunikasi sebagai alat dalam manajemen. Dengan demikian komunikasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyelenggaraan sekolah sebagai organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan utama dalam pemerataan pencerdasan bangsa.

SIMPULAN

Acuan standar yang jelas, koordinasi yang intensif, dan pemberdayaan sumber daya manusia yang tepat sesuai dengan pendekatan nilai-nilai budaya Rumah Betang dapat mencapai keefektifan penyelenggaraan program SD-SMP Satu Atap. Hal itu didukung oleh sikap kreatif dan inovatif dalam pemberdayaan sumber daya pendidikan berdasarkan nilai-nilai budaya rumah Betang seperti nilai kebersamaan, kekeluargaan, loyalitas, dan keakraban. Keefektifan penyelenggaraan program SD-SMP Satu Atap juga didukung oleh komunikasi secara intensif di antara berbagai komponen pendidikan.

Guru dan personel sekolah lainnya dituntut untuk terus memacu kreativitas dan inovasi sesuai dengan tantangan profesionalitas tenaga pendidikan, khususnya dalam bidang SMP Satu Atap di daerah terpencil. Kepala Sekolah perlu menerapkan struktur birokrasi yang sederhana dan mudah dipahami oleh seluruh personel sekolah. Dinas Pendidikan Kabupaten tidak perlu menerapkan sistem birokrasi yang rumit. Dinas juga harus memperhatikan, menginventarisasi, dan melengkapi sumber daya pendidikan yang masih sangat kurang untuk sekolah-sekolah di daerah terpencil.

DAFTAR RUJUKAN

Ary, D., Jacobs, L.C., & Razavieh, A. 2002. *Introduction to Research in Education*. Belmont, CA: Wadsworth Thomson Learning.

Bogdan, R.C. & Biklen, S.K. 1998. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon.

- Bollen, R. 1997. *Making Good Schools: Linking School Effectiveness and School Improvement*. New York: Routledge.
- Brienkerhoof, D.W. & Crosby, L.B. 2002. *Managing Policy Reform: Concept and Tool for Decision-Makers in Developing and Transitionong Countries*. United States of America: Kumarian Pers, Inc.
- Castetter, W.B. 1996. *The Human Resources Function in Educational Administration* (Sixth Edition). New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Dayurara. 2010. Rumah Betang dan Nilai Budaya yang Mulai Tergantikan. *Etnikprogresif*, (Online), (<http://etnikprogresif.blogspot.com/2010/09/rumah-betang-dan-nilai-kerukunan-yang.html>), diakses 12 Nopember 2011.
- Dunn, W.N. 1981. *Public Policy Analysis: An Introduction*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice, Inc.
- Dwijowijoto, R.N. 2004. *Komunikasi Pemerintahan*. Jakarta: Elek Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Edward, G. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly, Inc.
- Koehler. 1981. *Organizational Communication: Behavioral Perspective*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Kusni. J.J. 2009. *Pergulatan Identitas Dayak dan Indonesia: Belajar dari Tjilik Riwut*. Palangka Raya: Penerbit Galangpress.
- Mantja, W. 2008. *Ethnography: Desain Penelitian Manajemen Pendidikan*. Malang: Elang Mas.
- Miles, M.B. & Huberman, A.M. 1984. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. New York: Sage Publications.
- Nasution. S. 1998. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Transito.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar. Bandung: Penerbit Citra Umbara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Bandung: Penerbit Citra Umbara.
- Robbins, S.P. 1998. *Organizational Behavior*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, Inc..
- Sonhadji. K.H.A. 1996. *Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif*. Malang: Kalimasahda Press.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Bandung: Penerbit Citra Umbara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2006. Bandung: Penerbit Citra Umbara.
- Usop, M. 1994. *Pakat Dayak: Sejarah Integrasi dan Jati Diri Masyarakat Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah*. Palangka Raya: Yayasan Dikbud Batang Garing.
- Winarno, B. 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.